

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026**

Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN TAHUN 2026**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator

Pada Tanggal: 31 Juli 2025

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, SSTP.,M.M
NIP.19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator,



FATMA AINI LUBERINA, S.Pt,M.Sc
NIP.19970525 202506 2 001

Mengetahui,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah menyelesaikan penyusunan/perencanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2026, yang merupakan bentuk perencanaan program dan kegiatan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2026 adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Demikian Renja Kerja tahun 2026 ini kami susun semoga dapat menjadikan acuan dan sebagai peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SARWONO, S.Sos, M.M

Penyusun Utama Muda

NIP. 19660411 198607 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 7

1.3. Maksud dan Tujuan 9

1.4. Sistematika Penulisan 10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2025 11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan Capaian Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung 22

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung 64

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 67

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 76

2.6. Inovasi Perangkat Daerah..... 76

2.7. Penghargaan..... 77

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 78

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 78

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung 85

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 89

4.1 Program dan Kegiatan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 89

BAB IV PENUTUP 100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.....2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran s.d Tahun 2025	12
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran s.d Triwulan IV Tahun 2024	17
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Temanggung	23
Tabel 2.4	Indeks Rasa Aman dari Tahun 2020-2025 TW II	28
Tabel 2.5	Faktor Pendorong,Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	28
Tabel 2.6	Cakupan Penegakan Perda dan Perbup	30
Tabel 2.7	Tabel Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup sampai dengan Tahun 2024 TW IV	31
Tabel 2.8	Faktor Pendorong,Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	32
Tabel 2.9	Rasio Jumlah Linmas Per RT Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV	33
Tabel 2.10	Persebaran Anggota Linmas di Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung Tahun 2023	34
Tabel 2.11	Faktor Pendorong,Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	35
Tabel 2.12	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Tahun 2018 s/d 2023 TW IV	35
Tabel 2.13	Faktor Pendorong,Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	36
Tabel 2.14	Rasio Petugas Satpol PP Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s/d Tahun 2023 TW IV	37
Tabel 2.15	Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2023	38
Tabel 2.16	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K4 Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 TW I	42
Tabel 2.17	Tabel Data Pelanggaran Perda Terkait K4 per kecamatan Tahun 2023	42
Tabel 2.18	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV	44
Tabel 2.19	Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2023 s/d TW IV	44
Tabel 2.20	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV	48
Tabel 2.21	Faktor Pendorong,Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	49
Tabel 2.22	Faktor Pendorong,Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	50
Tabel 2.23	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I	51
Tabel 2.24	Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV	52
Tabel 2.25	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	53
Tabel 2.26	Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d. Tahun 2023 TW IV	54
Tabel 2.27	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	55

Tabel 2.28	Daftar Personil Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran s.d Tahun 2023 TW IV	55
Tabel 2.29	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 liter Pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV	59
Tabel 2.30	Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Tahun 2023	60
Tabel 2.31	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV	61
Tabel 2.32	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	62
Tabel 2.33	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran Temanggung s.d Tahun 2023 Tw IV	63
Tabel 2.34	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025	68
Tabel 2.35	Usulan program dan kegiatan masyarakat	76
Tabel 2.36	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023	76
Tabel 2.37	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023	77
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025	87
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2025	90
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2025	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

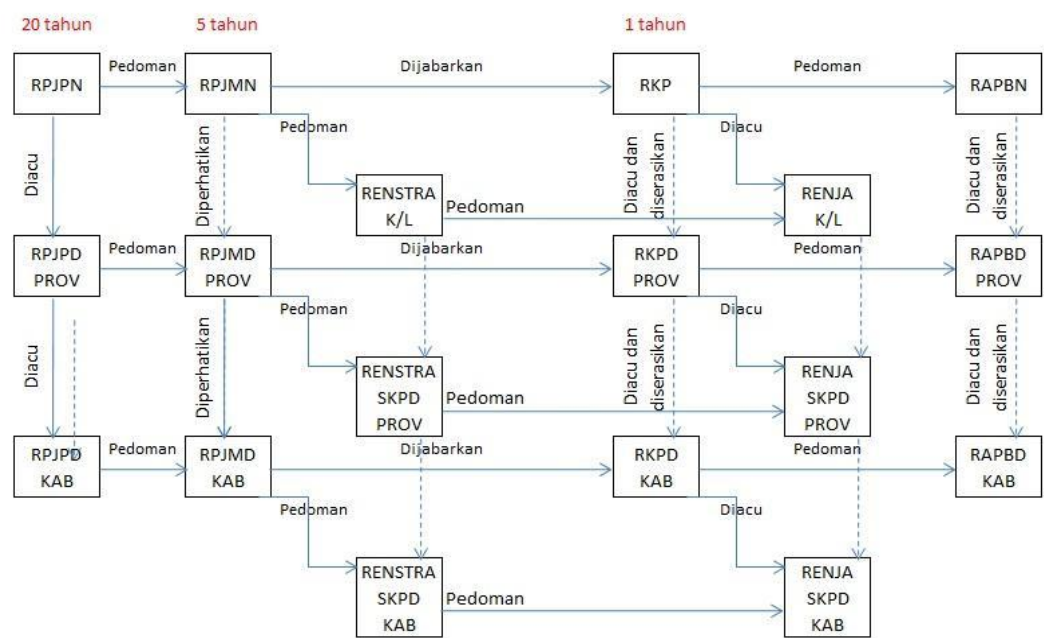
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 2) Kondisi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 4) Data Pokok Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;

- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

b. Analisis gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, dan realisasi tahun 2025 Triwulan II berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun lalu berdasarkan renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung ;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan,

hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan

pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja (Perangkat Daerah) dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
 13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TEMANGGUNG
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB	IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung
s.d Tahun 2024

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						5.582.888.266	6.682.617.649		6.507.367.129		97,38
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.858.599.266	5.643.221.649		5.497.909.451		97,43
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	42		14	4.858.599.266	5.643.221.649	14	5.497.909.451	100	97,43
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						138.615.000	138.615.000		132.660.600		95,70
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1		1	138.615.000	138.615.000	1	132.660.600	100	95,70
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah						196.000.000	118.857.000		117.185.937		98,59
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			12	10.000.000	10.000.000	12	9.984.500	100	99,85
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			12	20.000.000	20.000.000	12	19.710.000	100	98,55
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket			12	10.000.000	10.000.000	12	9.830.100	100	98,30
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan	Laporan			12	76.000.000	39.000.000	12	37.899.500	100	97,18

f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	80.000.000	39.857.000	12	39.761.837	100	99,76
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						285.000.000	133.250.000		123.238.000		92,49
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket			110	30.000.000	90.750.000	110	81.550.000	100	89,86
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			2	5.000.000	12.500.000	2	11.880.000	100	95,04
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1	250.000.000	30.000.000	1	29.808.000	100	99,36
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						244.674.000	263.674.000		254.558.531		96,54
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	65.000.000	84.000.000	12	77.645.739	100	92,44
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			6	7.500.000	7.500.000	6	7.330.000	100	97,73
c.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	172.174.000	172.174.000	12	169.582.792	100	98,50
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						145.000.000	385.000.000		381.814.610		99,17
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit			16	70.000.000	70.000.000	16	69.830.500	100	99,76

b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			20	65.000.000	65.000.000	20	64.907.110	100	99,86
c	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			20	5.000.000	5.000.000	20	5.000.000	100	100,00
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	20.000.000	120.000.000	1	118.466.000	100	98,72
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit			2	125.000.000	125.000.000	2	123.611.000	100	98,89
II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum						2.510.064.400	3.680.713.000		3.550.102.861		96,45
		Persentase Satlinmas yang terlatih		100		3,46			100		100	
		Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti		100		100			100		100	
		Persentase penegakan Pelanggaran Perda/Perbup		100		100			100		100	
		Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada		100		100			100		100	
1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.450.064.400	2.970.713.000		2.853.779.223		96,06
a.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen			12	940.181.000	865.181.000	12	772.082.858	100	89,24

b	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen			12	1.000.000.000	1.911.032.000	12	1.894.938.615	100	99,16
c	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang			200	339.000.000	114.500.000	200	107.332.500	100	93,74
d	pengecahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patroli, pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan			400	120.883.400	50.000.000	400	49.940.000	100	99,88
e	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan			8	50.000.000	30.000.000	8	29.485.250	100	98,28
2	Penegakan Perda Kabupaten Kota dan Peraturan Bupati/Walikota						60.000.000	710.000.000		696.323.638		98,07
a	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan			12	60.000.000	710.000.000	12	696.323.638	100	98,07

III	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						1.363.134.000	1.612.679.000		1.578.416.401		97,88
		Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100		75			50,65		67,53	
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		100		100			42,06		42,06	
		Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah		100		100			0		0	
		Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran		61,05		na			0		0	
		Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi		6,15		3,08			2,56		83,25	
		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran)		100		310			682		100	
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.228.679.000	1.562.679.000		1.535.476.401		98,26
a.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah	Laporan			12	100.000.000	330.460.000	12	329.986.048	100	99,86

		Kabupaten/Kota										
b.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen			12	96.059.000	307.290.000	12	306.975.500	100	99,90
c	Pembinaan aparatur Pemadaman Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Orang			291	1.032.620.000	707.035.000	291	685.164.719	100	96,91
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit			10	100.059.000	217.894.000	10	213.350.134	100	97,91
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						134.455.000	50.000.000		42.940.000		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang			28	134.455.000	50.000.000	28	42.940.000	100	85,88

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung
s.d Triwulan II Tahun 2025

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	II					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	20	21	22	23
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.634.877.596	12.827.611.876		2.297.336.594		4.531.635.213		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						9.634.877.596	12.827.611.876		2.297.336.594		4.531.635.213		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						7.990.595.596	11.273.661.976		1.914.513.596		4.028.957.527		35,74
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.884.727.596	7.894.012.926		1.595.458.526		3.163.836.840		40,08
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan			14	5.884.727.596	7.894.012.926		1.595.458.526		3.163.836.840	57,14	40,08
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						146.000.000	174.068.000		0		0		0,00
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket			1	146.000.000	174.068.000		0		0	0,00	0,00

		Kelengkapan												
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah						129.000.000	91.866.550		14.281.500		28.101.797		30,59
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			12	10.000.000	7.000.000		0		550.000	25,00	7,86
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket			12	0	0		0		0	0,00	0,00
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket			1	5.000.000	5.000.000		0		0	0,00	0,00
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			12	20.000.000	12.955.550		3.364.500		7.163.500	50,00	55,29
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket			12	10.000.000	6.000.000		2.074.500		3.760.500	50,00	62,68
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan	Laporan			11	39.000.000	38.411.000		5.211.000		9.420.000	45,45	24,52
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	45.000.000	22.500.000		3.631.500		7.207.797	50,00	32,03
4	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000	1.153.976.000		0		0		0,00
a	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			1	0	0		0		0	0,00	0,00
b	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			1	5.000.000	1.148.976.000		0		0	0,00	0,00

c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit			1	5.000.000	5.000.000		0		0	0,00	0,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.780.725.000	1.780.725.000		270.932.570		792.192.390		44,49
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	84.000.000	84.000.000	3	18.133.981	6	33.902.866	50,00	40,36
b	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			12	7.500.000	7.500.000	3	2.330.000	3	2.330.000	25,00	31,07
c.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	1.689.225.000	1.689.225.000	2	250.468.589	6	755.959.524	50,00	44,75
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						159.857.000	179.013.500		33.841.000		44.826.500		25,04
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			20	59.857.000	54.513.500	5	9.605.000	7	13.192.000	35,00	24,20
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			16	75.000.000	100.000.000	4	24.236.000	8	31.634.500	50,00	31,63
c	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			10	5.000.000	4.500.000		0		0	0,00	0,00

d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	20.000.000	20.000.000		0		0	0,00	0,00
II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum						946.000.000	1.006.377.500		190.699.900		231.853.900		23,04
		Persentase Satlinmas yang terlatih		100		6,92			1,73		1,73		25	
		Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti		100		100			100		100		100	
		Persentase penegakan Pelanggaran Perda/Perbup		100		100			100		100		100	
		Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada		100		100			100		100		100	
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						126.000.000	74.015.000		26.420.500		37.179.500		50,23
a	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen			12	50.000.000	0		0		0	0,00	0,00
b	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan	Orang			1.050	30.000.000	0		0		0	0,00	0,00

	Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya												
c.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patroli, pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan			400	126.000.000	74.015.000		26.420.500		37.179.500	50,00	50,23
d	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan			12	50.000.000	0		0		0	0,00	0,00
e	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit			1	20.000.000	0		0		0	0,00	0,00
2	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota						640.000.000	932.362.500		164.279.400		194.674.400		20,88
a	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan			12	40.000.000	0		0		0	0,00	0,00

b	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan			12	600.000.000	932.362.500		164.279.400		194.674.400	50,00	20,88
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan					30.000.000	0		0		0		0,00
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan			12	30.000.000	0		0		0	0,00	0,00
III	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						172.180.000	547.572.400		192.123.098		270.823.786		49,46
		Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100		80			20,00		20,00		25	
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		100		100			35,29		35,29		35,29	
		Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah		100		100			0		0		0	

		Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran		61,05	na			0		0		0	
		Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi		6,15	3,08			1,45		1,45		23,63	
		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran)		100	305			409		409		134.10	
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					405.368.000	547.572.400		192.123.098		270.823.786		49,46
a.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		12	110.580.000	320.266.400		92.243.098		151.520.786	50,00	47,31
b.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen		12	61.600.000	227.306.000		99.880.000		119.303.000	50,00	52,49
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal	Unit		1	233.188.000	0		0		0	0,00	0,00

		Sesuai Standar Teknis Terkait												
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						6.400.000	0		0		0		0,00
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen			12	6.400.000	0		0		0	0,00	0,00
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						126.800.000	0		0		0		0,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang			12	126.800.000	0		0		0		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Indeks Rasa Aman
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Persentase Satlinmas yang terlatih
 - b. Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase penegakan Perda/Perbup
 - d. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada
 - e. Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran)
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Fasilitasi kunjungan tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Pengadaan mebel

- i. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- j. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- k. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- l. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- m. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
- n. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- p. Pemeliharaan Mebel
- q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
- r. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- s. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
- t. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- u. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- v. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patroli, pengamanan, dan Pengawasan;
- w. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- x. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
- y. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- z. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri
 - aa. Pembinaan aparaturnya Pemadam Kebakaran
 - bb. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - cc. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah tidak ada.
 5. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, adalah tidak ada
 6. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, adalah :
 - a. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
 - b. Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
 - c. Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran
 - d. Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi
 7. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah tidak ada

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sedang** yaitu dengan nilai **73,39%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian Kinerja : 100 % kategori Sangat Tinggi

2. Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Capaian Kinerja : 73,21 % kategori sedang

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan belum semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung
Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw II 2025	Status Capaian				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR
	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)														
1	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	na	100	100	100	100	100		100	ST				
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	60,64	100	100	100	51,12	38,64		38,64					SR
3	Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	Angka	545	310	305	300	682	409		134,10	ST				
	INDIKATOR PROGRAM														
A	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
1	Persentase Satlinmas yang terlatih	%	na	3,46	6,92	10,38	3.118,69	1,73		25					SR
2	Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	na	100	100	100	100	100		100	ST				
3	Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100	100	100	100	100	100		100	ST				
B	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran														
4	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah	%	49	75	80	91,67	50,65	20,00		25,00					SR

	Manajemen Kebakaran (WMK)													
5	Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	39	100	100	100	42,06	35,29		35,29				SR
6	Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	%	0	100	100	100	0	0		0				SR
7	Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	%	na	3,08	6,15	9,23	2,56	1,45		23,63				SR

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status sangat tinggi ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
Jumlah Linmas yang sudah terlatih cukup banyak dan adanya alokasi ADD dan AD Kelurahan untuk pembinaan Linmas, percepatan aduan melalui media social, sosialisasi tentang Perda dan Perkada secara massif
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
Animo masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kecil, karena tidak mendapatkan gaji/upah/tunjangan/santunan apa pun, sehingga anak muda lebih memilih untuk bekerja di sektor ekonomi yang lain, kurangnya sumber daya manusia di Bidang Trantibumlinmas, dan kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap peraturan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
mengadakan pembinaan linmas ke desa/kelurahan, peningkatan SDM di bidang Trantibum Linmas, sosialisasi terhadap Masyarakat tentang peraturan perundang-undangan.
 - b. Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
Memanfaatkan peralatan yang ada untuk dimodifikasi guna mengurangi resiko bagi anggota saat penanganan kejadian dan anggota damkar mengikuti diklat secara mandiri dan melalui medsos Untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
APD dan sarpras yang dipergunakan belum sesuai standar, Anggota damkar belum pernah mendapatkan diklat resmi dari pemerintah dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia , serta Letak geografis Temanggung yang menyulitkan untuk diakses saat penanganan kejadian.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
Pemenuhan sarpras dan APD minimal yang siap

dipergunakan dengan usulan pengajuan anggaran, Mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan anggota damkar baik PNS maupun non-PNS

c. Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
Pemanfaatan media social dalam penyebarluasan informasi
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/produk hukum lainnya
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
Secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengintensifkan patroli

d. Persentase penegakan Perda/Perbup

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
Terdapat kelompok masyarakat yang ikut mensosialisasikan Perda dan Perbup serta Memaksimalkan keberadaan personil dan prasarana yang ada.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/produk hukum lainnya, Kurangnya dukungan sarpras dalam pelaksanaan tugas, Terbatasnya personil yang memiliki kualifikasi dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas serta terbatasnya dukungan anggaran
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
Secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengintensifkan patrol, mengikutsertakan personil untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis

2. Capaian indikator dengan status tinggi adalah tidak ada

3. Capaian indikator dengan status sedang adalah tidak ada

4. Capaian indikator dengan status rendah adalah tidak ada

5. Capaian indikator dengan status sangat rendah ada 6 terdiri dari:

a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :
Kondisi suhu udara yang dingin di Temanggung karena topologi Temanggung yang pegunungan, perbukitan,

kecepatan laporan informasi kebakaran dan lokasi kejadian dekat dengan lokasi pos Damkar sehingga bisa langsung teratasi

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :

Temanggung memiliki wilayah yang luas, topologi Temanggung yang pegunungan, perbukitan dan lembah, model pemukiman yang padat membuat akses jalan menjadi sempit, banyaknya masyarakat yang berkerumun mengakibatkan akses jalan terhambat, pengetahuan warga mengenai bahaya kebakaran masih rendah, dan armada Damkar yang sudah tua

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :

Peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi pegawai dan pemberdayaan masyarakat

b. Persentase Satlinmas yang terlatih

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :

Jumlah Linmas usia tua masih cukup banyak dan Adanya alokasi Anggaran Dana Desa dan Kelurahan untuk pembinaan Linmas

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :

Animo masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kecil, karena tidak mendapatkan gaji/upah/tunjangan/santunan apa pun, sehingga anak muda lebih memilih untuk bekerja di sektor ekonomi yang lain.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengadakan pembinaan dan pendataan linmas desa/kelurahan

c. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sudah ada tambahan pos damkar di dua lokasi pringsurat dan candiroto yg dapat sedikit mempercepat rentang kendali saat terjadi kebakaran.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran, kondisi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil, menyulitkan

kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian, kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, sehingga menghambat pergerakan anggota dan kendaraan damkar dalam proses pemadaman, kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, koneksi, nozel, dll) yang sudah tua

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran

d. Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Sarana Media sosial sangat membantu memberikan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan mempercepat menyampaikan Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :

Wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontur pegunungan, portal, jalan sempit, dll, Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran, Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi, Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di Pos Damkar, Menambah Pos Pemadam Kebakaran di setiap WMK

e. Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan

kebakaran

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah

Kondisi suhu udara yang dingin di Temanggung karena topologi pegunungan dan perbukitan, serta kecepatan laporan informasi kebakaran dan lokasi kejadian dekat dengan lokasi Post Damkar sehingga bisa langsung teratasi

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah

Wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll, Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran, luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candioto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta menambah Pos Pemadam Kebakaran di setiap WMK.

f. Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi.

1) Faktor pendorong indikator tersebut Adalah

Kesadaran masyarakat tentang perlunya proteksi bahaya kebakaran pada gedung dan bangunan serta Damkar Temanggung sudah di libatkan menjadi Anggota Tim Bangunan Gedung Kabupaten

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah

Ketersediaan peralatan inspeksi proteksi kebakaran yang masih terbatas serta keterbatasan jumlah pegawai yang menangani pencegahan kebakaran

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

Sosialisasi dan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya proteksi kebakaran pada gedung dan bangunan serta mengusulkan tambahan pegawai baik melalui mutasi maupun penerimaan baru pegawai (PNS/P3K) kepada pejabat pembina kepegawaian (Bupati)

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Data Pokok Bidang Pemadaman Kebakaran, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Indeks Rasa Aman

Definisi “Rasa Aman” berdasarkan UU No 9 Tahun 1999 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Implementasi dari Indikator Rasa Aman dalam kajian ini adalah untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Ada empat komponen yang terdapat dalam Indikator Rasa Aman, antara lain: 1) Keamanan dari Bencana; 2) Pemenuhan Kesejahteraan Sosial; 3) Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan 4) Keamanan dari Kekerasan.

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi resiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab.

Untuk memperoleh angka indeks rasa aman, didapatkan dari survey indeks pembangunan masyarakat berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang.

Realisasi indeks rasa aman di Kabupaten Temanggung diperoleh berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang tahun 2022 adalah 4,55 (skala 1-5) dengan kategori sangat baik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Indeks Rasa Aman dari Tahun 2020-2025

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Rasa Aman	Angka	4,36	4,48	4,55	4,55	4,65	4,65

sumber data : P5 Universitas Diponegoro Tahun 2023 TW IV

Pada tahun 2018 belum dilaksanakan perhitungan Indeks Rasa Aman, baru di tahun 2019 mulai dilaksanakan perhitungan Indeks Rasa Aman dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.5
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Indeks Rasa Aman	1. Adanya kerjasama antar Instansi terkait untuk berkoordinasi; 2. Adanya peran serta masyarakat untuk memberikan laporan kejadian. 3. Media sosial membantu mempercepat penyampaian informasi kejadian kebakaran serta sebagai sarana sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat	.	1. Koordinasi dan memaksimalkan peran aktif antar instansi terkait; 2. Memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang penegakan Perda/Perbup /Produk hukum lainnya; 3. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan; 4. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan Linmas 5. Memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan, penyelamatan dan evakuasi kebakaran 6. Peningkatan kapasitas SDM melalui Diklat atau Bimtek 7. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/Produk hukum lainnya; 8. Kondisi wilayah kabupaten Temanggung berpa pegunungan, perbukitan, model pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang sempit, sehingga menghambat proses pemadaman kebakaran; 9. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan; 10. Animo masyarakat untuk menjadi anggota Linmas masih sangat kecil; 11. Terbatasnya personil yang memiliki kualifikasi dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

b. Persentase Satlinmas yang Terlatih

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala Desa/Kelurahan, membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran, membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu upaya pertahanan negara, membantu pengamanan obyek vital dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Untuk memperoleh Presentase Satlinmas yang terlatih dapat diukur dengan menggunakan rumus jumlah desa/kelurahan yang sudah melatih dan mengukuhkan Satlinmasnya dibagi jumlah desa/kelurahan dikali 100.

Tabel 2.6
Presentase Satlinmas yang Terlatih
Kabupaten Temanggung, Tahun 2023 s.d Tahun 2025 TW II

NO	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025 Tw II
1.	Jumlah Desa/Kelurahan yang sudah melatih dan mengukuhkan Satlinmas	9.619	9.013	5
2.	Jumlah Desa/Kelurahan	5.913	289	289

3.	Presentase	1,6	100	1,73
----	------------	-----	-----	------

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian presentase satlinmas yang terlatih pada Tahun 2025 triwulan II sebesar 1,73% dari target Tahun 2025 sebesar 6,92%. Capaian Tahun 2025 triwulan II ini, jika di bandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan disebabkan karena rumus penghitungan pada pembilangnya berubah. Pada Tahun 2024 rumus pembilangnya menggunakan jumlah satlinmas yang sudah terlatih sedangkan di Tahun 2025 rumus pembilangnya menggunakan jumlah Desa/Kelurahan yang sudah melatih dan mengukuhkan Satlinmasnya.

Tabel 2.7
Data Desa/Kelurahan yang sudah melatih Satlinmasnya
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2025

NO	WAKTU	DESA / KELURAHAN	JML SATLINMAS	JUDUL PELATIHAN	DOKUMENTASI	
1	04 November 2024	Desa Jetis, Kecamatan Selopampang	20 org	Pembinaan Satlinmas		
2	14 November 2024	Desa Salamrejo, Kecamatan Selopampang	25 org	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan		
3	19 November 2024	Desa Bumiayu, Kecamatan Selopampang	21 org	Peningkatan Kesadaran Hukum & Keamanan, Ketentraman Masyarakat		
4	07 Mei 2025	Desa Tuksari, Kecamatan Kledung	25 org	Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Linmas		

5	12 Juni 2025	Desa Rejosari, Kecamatan Kledung	20 org	Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas		

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025

faktor pendorong dan penghambat capaian indicator presentase Satlinmas yang terlatih adalah sudah ada alokasi ADD dan AD kel Untuk pembinaan Linmas. Sedangkan Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan pembinaan Linmas ke Desa/Kelurahan.

Tabel 2.8

Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Presentase Satlinmas yang Terlatih	1. Jumlah Linmas usia tua masih cukup banyak. 2. Adanya alokasi ADD dan AD kel. Untuk pembinaan Linmas	Up date data jumlah Linmas sangat sulit dilaksanakan karena dari pihak desa kesulitan untuk melaksanakan pendataan (ujung-ujungnya dikira memberi bantuan)	1.mengadakan sosialisasi dan pembinaan linmas ke desa/kelurahan

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2025

c. Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti

Penyelesaian aduan yang berkaitan dengan Tramtibum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelayanan aduan dari masyarakat terkait gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat baik dalam bentuk laporan secara langsung, melalui telepon, bersurat, maupun lewat whats-App, Satpol PP dan Damkar siap melayani selama 24 jam, selain itu Satpol PP dan Damkar juga mengadakan pelatihan untuk anggota Linmas dalam rangka mempercepat pelayanan di bidang ketertiban umum di tingkat Desa/Kelurahan.

Tabel 2.9
Presentase Pengaduan yang berkaitan dengan Tramtibum

No.	Jenis Aduan Pelanggaran Perda	Lokasi Kegiatan	Tahun		
			2023	2024	2025 Tw II
1	PGOT	Kabupaten Temanggung	n.a	27	7
2	IMB		n.a	9	1
3	Minuman Beralkohol		n.a	6	0
4	Reklame		n.a	32	0
5	PKL		n.a	40	3
JUMLAH				114	11

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa aduan yang berkaitan dengan Tramtibum yang masuk dikantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebanyak 11 aduan, yang terdiri dari : aduan PGOT sebanyak 7 (tujuh) kali, IMB sebanyak 1 (Satu) kali, dan PKL sebanyak 3 (tiga) kali. Dari semua aduan yang masuk, semua ditangani dan ditindaklankuti oleh Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Temanggung. Adapun untuk aduan yang berkaitan dengan PGOT prosedur penanganannya target dijemput oleh anggota Satpol PP kemudian diserahkan ke Dinsos untuk dilakukan penanganan selanjutnya.

d. Presentase Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Presentase penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran Perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumus Presentase penegakan perda dan/atau perbup adalah Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perbup yang ditangani di tahun bersangkutan dibagi Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perbup yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan dikali 100.

Presentase penegakan Perda dan Perbup pada tahun 2023 s/d 2025 TW II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Table 2.10
Presentase Penegakan Perda dan Perbup
Kabupaten Temanggung, Tahun 2023-2025 TW II

Uraian	Satuan	2023	2024	2025 Tw II
--------	--------	------	------	------------

Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani	kasus	2045	1707	71
Pelanggaran Perda/Perbup yang dilaporkan atau dipantau	kasus	2045	1707	71
Presentase penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	100	100

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Tw II

Tahun 2023 strategi penanganan pelanggaran perda reklame sedikit berubah yaitu dengan adanya instruksi bapak Bupati agar tiap Kecamatan membantu Satpol PP dalam menertibkan reklame yang melanggar perda. Meskipun dengan keterbatasan sarana serta anggaran semua pelanggaran Perda dapat terselesaikan (100%). Tahun 2024 TW II dan TW IV pelanggaran K4 sangat banyak terjadi, karena di TW II ada pesta demokrasi Pilpres dan Pileg, dan di TW IV ada Pilgub dan Pilkada sehingga banyak terdapat pelanggaran pemasangan APK (alat peraga kampanye). Sedangkan di tahun 2025 TW II pelanggaran belum banyak terjadi. Selain pelanggaran perda k4 / reklame juga terdapat pelanggaran Perda PGOT yaitu adanya anak- anak punk, pengamen, pengemis, badut-badut, serta kegiatan lain yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang kebanyakan berasal dari luar daerah. Akan tetapi dengan banyaknya pelanggaran tersebut tidak menghalangi Satpol PP Kabupaten Temanggung dalam berkarya menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati .

Adapun pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tahun 2025 TW II dapat tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Tabel Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup menurut Perda/Perbup
Sampai dengan Tahun 2025 TW II

No.	Jenis Pelanggaran Perda	Perda / Perbup	Lokasi Kegiatan	Jumlah
1	PGOT	No. 3 tahun 2013	Wilayah Kabupaten Temanggung (20 Kec)	19
2	IMB	No. 15 tahun 2011		3
3	Minuman Beralkohol	No. 5 tahun 2015		1
4.	Reklame	No. 33 tahun 2011		15

5.	PKL	No. 3 tahun 2019	33
JUMLAH			71

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Tw I

Jenis Pelanggaran dimaksud sesuai dengan hasil giat operasi di lapangan terkait dengan perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila (PGOT), Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang IMB dan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol, Perda Nomor 33 Tahun 2011 tentang Reklame. serta penambahan penegakan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan II tahun 2025 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.12
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1. Terdapat kelompok masyarakat yang ikut mensosialisasikan Perda 2. Memaksimal kan keberadaan personil dan prasarana yang ada.	1.Kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/ Produk Hukum lainnya 2.Kurangnya dukungan sarpras dalam pelaksanaan tugas 3.Terbatasnya personal yang memiliki kualitas dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas	1. Secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengintensifkan patroli 2. Mengikutsertakan personil untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025

- e. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda adalah jumlah warga yang mengalami kerugian akibat dari penegakan Perda dan Perkada baik kerugian materiil maupun luka-luka, sedangkan jumlah kejadian adalah jumlah

kegiatan Satpol PP dalam melaksanakan penertiban ataupun penegakan Perda dan Perkada.

Rumus untuk mengetahui Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada dibagi jumlah kejadian dikali 100 %.

Tabel. 2.13
Presentase warga negara yang memperoleh layanan
Akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada
Tahun 2020 s/d 2025 TW II

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda	n.a	0	0	0	0	0
2.	Jumlah kejadian	n.a	1880	1470	525	150	71
3.	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada	n.a	100	100	100	100	100

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung tahun 2025 TW II

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada merupakan indikator program baru pada tahun 2021 triwulan II. Capaian presentase warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada Tahun 2025 triwulan II sebesar 100%, angka itu di peroleh dari, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di tahun 2025 triwulan II adalah 0 (nol), dengan pengertian bahwa Satpol PP dalam melaksanakan penertiban dan penegakan Perda selalu mengedepankan persuasive dan humanis, sehingga tidak ada gesekan ataupun benturan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun luka-luka. Jumlah kejadian sampai dengan Tahun 2025 triwulan II sebanyak 71. Jumlah 71 adalah jumlah kegiatan Satpol PP dalam melakukan penertiban dan penegakan hukum

Perda dan Perkada, di tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan II tahun 2025 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.14
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1.Dalam melaksanakan penertiban dan penegakan Perda selalu mengedepankan persuasive dan humanis, sehingga tidak ada gesekan ataupun benturan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun luka-luka	1.Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan perda dan Perbup 2.Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penegakan Perda dan Perbup	1. Sosialisasi pada masyarakat tentang penegakan Perda dan Perbu 2. Peningkatan kapasitas PPNS

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025

2. Bidang Pemadam Kebakaran

a. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Rumus tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap dibagi Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan II tahun 2025 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.15
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATO R PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	<div>1. sudah ada tambahan pos damkar di dua lokasi pringsurat dn candiroto yg dpt sedikit mempercepat rentang kendali saat terjadi kebakara.</div> <div>2. Kondisi kabupaten temanggung yang masih tidak terlalu padat khususnya kepadatan dijalan raya, kepadatan hanya terjadi dilokasi dn waktu tertentu saja</div> <div>3. media sosial membantu mempercepat informasi terjadinya kebakaran sampai kepada pos damkar untuk segera diantisipasi dn ditanggulangi</div>	<div>1. kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dalam kondisi kecepatan tinggi, berisi air dan jalan yang berliku, naik turun atau gelombang yang dapat membahayakan keselamatan orang yang ada dalam kendaraan maupun yang berada di sekitar kendaraan damkar</div> <div>2. kondisi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil, menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian</div> <div>3. kompetensi anggota damkar khususnya penerapan strategi pemadaman disesuaikan dengan objek yang terbakar dan lingkungan sekitarnya perlu ditingkatkan, karena setiap kebakaran memiliki strategi pemadaman yg berbeda agar proses pemadaman dpt cepat, efektif dn efisien</div> <div>4. kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, mulai dari masyarakat yg tdk memberi jalan untuk kendaraan damkar meski sudah dinyalakan sirine maupun masyarakat yg berkerumun di lokasi kebakaran untum photo2 atau nonton yg menghambat pergerakan anggota dn kendaraan damkar dlm proses pemadaman</div> <div>5. kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, y koneksi, nozel, dll) yang sudah tua dan lapuk karena usia dn sering dipergunakan mengakibatkan proses pemadaman lambat, lama, tidak efektif dn efisien contohnya, selang yg bocor di beberapa titik, nozel yg semprotannya tidak sempurna, dll</div>	<div>1.peremajaan atau Pengadaan Armada Damkar Baru</div> <div>2.Memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran</div> <div>3.Penambahan Pos Damkar sesuai WMK di RISPK</div> <div>4.Pengadaan Sarana dan Prasarana Baru (Nozzle,selang, Y Connection dan kelengkapannya</div>

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Realisasi persentase Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 s.d 2025 TW II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 s.d Tahun 2025 TW II

NO	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit	30	23	21	44	39	6
2.	Jumlah kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK	54	30	35	90	77	30
3.	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate-%)	55,56%	76,67%	60%	48,88%	50,64%	20%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Tw II

- ✚ Dari 22 kasus kebakaran di Temanggung, ada 20 kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkauan WMK
- ✚ Dari 20 kasus di WMK ada 6 kasus yang bisa tertangani dalam 15 menit

Response time memiliki beberapa faktor kendala sebagai berikut:

- a) Lokasi kasus kebakaran yang berbeda-beda tempat setiap tahunnya
- b) Keterlambatan masyarakat dalam melaporkan berita kebakaran
- c) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran
- d) Kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas
- e) Perubahan kondisi lalu lintas;
- f) Perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran yang sebagian sudah berumur;
- g) Hambatan *akseleri* unit pemadam kebakaran antara lain wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
- h) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.
- i) Belum optimalnya koordinasi instansional.

Data kejadian kebakaran selama tahun 2025 TW II dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.17
Data Kebakaran Kabupaten Temanggung
Tahun 2025 TW II

No.	Hari	Tanggal	Info Masuk	Sampai lokasi	Selesai	Waktu Penanggulangan (Response Time)	Pemilik	Umur	Pelapor	Lokasi Kebaklaran		Fungsi Bangunan Yang Terbakar	Penyebab	Terdampak		Korban		Luas M ²	Kerugian	Aset yang terselamatkan
										Alamat	Kecamatan			KK	Jiwa	Jiwa	Luka			
1	Kamis	2/1/2025	4:45:00 PM	5:11:00 PM	5:55:00 PM	26	Ibu Khoiriyah		Polsek Pringsurat	Dsn Krajan RT 03 RW 01, Ds.Soborejo,	Pringsurat	rumah (dapur)	Tungku		3	nihil	nihil		10,000,000	Rp 400,000,000
2	Sabtu	4/1/2025	2:50:00 PM	3:02:00 PM	4:08:00 PM	12	Bapak Musrokhim		Bapak Giri	Lotermas 003/005, Tepusen, L5	Kaloran	rumah (dapur)	Tungku		3	nihil	nihil		Rp 15,000,000	Rp 700,000,000
3	Selasa	7/1/2025	12:05:00 PM	12:11:00 PM	5:24:00 PM	6	PT ABP Temanggung		Ibu Wulan	Jl. Raya Kedu Km 03, Candimulyo, Kedu, Kab. Temanggung	Temanggung	Pabrik kayu lapis	Oven		500	Nihil	nihil		Rp 500,000,000	Rp 10,000,000,000
4	Rabu	8/1/2025	12:14:00 AM	1:05:00 AM	4:00:00 AM	51	Bp Ruman	65	Ibu Marsinah (Kades)	Dsn.Kebondalem Ds.Kebondalem RT 004 RW 001	Bejen	rumah (dapur)	Tungku	2	6	Nihil	nihil		Rp 50,000,000	
5	Minggu	12/1/2025	2:26:00 AM	2:47:00 AM	5:31:00 AM	21	Bp Ikbai		Bapak Didik	Dusun Ngondong RT01 RW05	Parakan	Kandang Ayam (PT. Sido Agung Magelang)	konsleting listrik		4	nihil	nihil		Rp 600,000,000	Rp 2,500,000,000
6	Kamis	2/6/2025	00:28:00	00:55:00	02:18:00	27	Bp Muhlisin	61	Bp Natasin	Tanduran Rt 001 RW 003 Caturanom	Parakan	rumah	Tungku	1	1	Nihil	nihil	60	100,000,000	Rp 800,000,000

RENJA 2026 SATPOL PP DAN DAMKAR

7	Selasa	11-02-2025	9:39:00 AM	10:05:00 AM	10:21:00 AM	26	Bapak Rurok him	39	Bp Arli T	Dusun Tempuran RT 01 RW 04 Desa Sidotopo,	Kaloran	rumah	konsle ting listrik	2	10	Nihil	nih il		Rp 50,000,000	Rp 500,000,000
8	Kamis	2/20/2025	8:30:00 AM	8:41:00 AM	9:25:00 AM	11	Bp Robani yah	43	Bp Budi Purwa nto	Kintelan RT 01 RW 006 Danupayan	Bulu	Toko	Tungk u		2	Nihil	nih il	3 0	Rp 20,000,000	Rp 60,000,000
9	Kamis	2/20/2025	2:45:00 PM	3:05:00 PM	3:50:00 PM	50	Ibu Surami nem	80	Ibu Desta	Krajan Klepu	Pringsur at	rumah	Tungk u	1	3	Nihil	nih il	4 8	Rp 50,000,000	Rp 500,000,000
10	Sabtu	2/22/2025	6:05:00 PM	6:22:00 PM	7:43:00 PM	15	Bp Boiran	49	Ibu Trina	Madusari RT 003 Rw 003 Sanggrahan	Kranggan	pabrik kerup uk	Tungk u	1	3	Nihil	nih il	1 5 0	Rp 25,000,000	Rp 2,000,000,00 0
11	Senin	2/24/2025	2:02:00 PM	2:43:00 PM	4:02:00 PM	20	Bp Kirma n	69	Bp Edi	Depokan Tlogopucang	Kandang an	rumah	konsle ting listrik	1	3	Nihil	nih il	4 2	Rp 300,000,000	Rp 1,000,000,00 0
12	Minggu	3/6/2025	12:58:00 PM	1:10:00 PM	2:05:00 PM	12	Bp Enggar		Bp Rama	Dsn Karanganom 003/001 Ds Balerejo	Tlogomul yo	mobil col -T	konsle ting listrik	1	4		1		50,000,000	Rp 500,000,000
13	Selasa	3/11/2025	11:24:00 AM	11:36:00 AM	12:35:00 PM	12	Ibu Riyam	67	Ibu Yanti	Kwarasan Gunung 09/02 Muneng	Candirot o	rumah (dapur)	tabung gas	1	2	Nihil	nih il	1 2	Rp 5,000,000	Rp 400,000,000
14	Selasa	3/11/2025	2:15:00 PM	2:28:00 PM	3:11:00 PM	13	Bp Jumadi	47	Bp Dian	Condong 003/003 Mojotengah	Kedu	rumah (dapur)	Tungk u	2	5	Nihil	nih il	8 0	Rp 50,000,000	Rp 250,000,000
15	Kamis	3/13/2025	1:32:00 PM	1:56:00 PM	2:31:00 PM	24	Bp Wahyu di		Bp Hafidz	Dranan 003/005 Bojonegoro	Kedu	rumah (dapur)	tabung gas	1	4	Nihil	nih il	3 0	Rp 5,000,000	Rp 150,000,000
16	Senin	3/18/2025	10:40:00 AM	10:51:00 AM	11:37:00 AM	11	Akhsan Zakky	38	Bp Ade	Jl. Achmad Yani, Banyurip, Temanggung, Kabupaten Temanggung	Temangg ung	kendar aan (mobil)	konsle ting listrik	1	3	Nihil	nih il		21,000,000.00	
17	Rabu	3/19/2025	7:49:00 PM	8:09:00 PM	9:25:00 PM	20	Bp Sugion o	46	Bp Anang	Mijen RT 004/ RW 001 Tawangsari	Kedu	rumah	konsle ting listrik	1	4	Nihil	nih il	3 6	20,000,000.00	Rp 200,000,000
18	Sabtu	3/22/2025	10:51:00 AM	12:37:00 PM	2:14:00 PM	3'24'00	Ibu Kusum a Warni	60	Bp Bagus	Klewokan 01/10	Parakan	rumah	tabung gas		3	Nihil	nih il	5 6	5,000,000.00	Rp 300,000,000
19	Jum'at	3/28/2025	2:53:00 AM	3:07:00 AM	4:00:00 AM	7	Bp Nirwan to	56	Ibu Nur	Ngijingan 002/001	Kedu	rumah (dapur)	Kompo r	3	12	Nihil	nih il	8 0	150,000,000.0 0	Rp 800,000,000

RENJA 2026 SATPOL PP DAN DAMKAR

20	Minggu	3/30/2025	6:51:00 PM	6:56:00 PM	7:41:00 PM	6	Ibu Zulfah	56	Ibu Zulfah	Jurang Juwari 001/008 Kedungumpul	Kandang an	rumah (dapur)	Tungk u	1	2	Nihil	nih il	2 0	Rp 20,000,000	Rp 400,000,000
21	Senin	3/31/2025	7:37:00 AM	7:49:00 AM	8:16:00 AM	12	Setyo Budi Raharjo		Setyo Budi Raharjo	Jl Mujahidin 002/004 Gang IV No 48	Temanggung	intalasi listrik	konsleting listrik		1	Nihil	nih il		Rp 1,000,000	Rp 300,000,000
22	Senin	3/31/2025	5:42:00 AM	5:49:00 AM	6:15:00 AM	7	PLN Sub Kandangan		Bp Faizal Rizky	Jengkiling 002/005 Wadas	Kandang an	intalasi listrik	konsleting listrik		1	Nihil	nih il		Rp 1,000,000	Rp 50,000,000
23	Selasa	4/8/2025	9:04:00 AM	9:20:00 AM	11:45:00 AM	16	Muhjito	90	Bp Hasan	Kebumen I RT 002 RW 003	Pringsurat	rumah	-	1	2	1		9	15,000,000	Rp 500,000,000
24	Kamis	4/17/2025	9:25:00 PM	9:42:00 PM	10:13:00 PM	17	Alfamart KSO Danupayan		Karyawan	Growo Danupayan	Bulu	kabel spido	konsleting listrik				nih il	2	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000,000
25	Kamis	4/24/2025	8:08:00 AM	8:24:00 AM	8:29:00 AM	16	Bp M Nasikun		Bp Rohim	Jl Secang Temanggung Ngabeyan (SPBU)	Kranggan	Mobil	konsleting listrik						Rp 120,000,000	Rp 8,000,000,000
26	Jum'at	4/25/2025	1:19:00 PM	1:51:00 PM	2:40:00 PM	32	Ibu Sualmiati	45	Bp Davi	Krajan 01/01 Gowak	Pringsurat	Rumah (dapur)	konsleting listrik	1	3	Nihil	nih il	4 2	Rp 10,000,000	Rp 1,000,000,000
27	Senin	5/5/2025	20:35:00	21:11:00	22:44:00	36	Madhonn	40	Camat Gemawang	Krempong 005/002	Gemawang	Rumah	Tungk u	1	5	Nihil	nih il	2 1	5,000,000	100,000,000
28	Selasa	5/20/2025	11:45:00 AM	11:59:00 AM	12:50:00 PM	14	Hanifudin	37	Hanifudin	Ketuwon Wetan 002/002 Malebo	Kandang an	Rumah	Tungk u	1	4	Nihil	nih il	5 0	50,000,000	Rp 500,000,000
29	Rabu	5/21/2025	10:16:00 PM	10:33:00 PM	11:37:00 PM	17	Suyitno	58	Rizki	Paponan 001/003	Bejen	Rumah	Tungk u	2	5	Nihil	nih il	8	Rp 10,000,000	Rp 1,500,000,000
30	Jum'at	5/23/2025	11:34:00 PM	11:47:00 PM	12:50:00 AM	10	Siswandi	79	Warga	Tloyo 002/003 Karang Gedong	Ngadirejo	Rumah	human error	1	2	Nihil	nih il	4	Rp 10,000,000	Rp 2,000,000,000
31	Rabu	6/11/2025	8:45:00	9:13:00	10:22:00	28	Nur Hidayat	53	warga	Sidotopo 001/004 Tempuran	Kaloran	rumah (dapur &kandang)	Tungk u	1	4	Nihil	nih il	1 6	40,000,000	500,000,000
32	Jum'at	6/20/2025	5:52:00 PM	6:16:00 PM	7:12:00 PM	24	PT Sekawan ahabat Sejati		Ibu Novita	Jl Raya Kranggan	Kranggan	cilo	Serbuk			Nihil	nih il		25,000,000	Rp 100,000,000,000

33	Jum'at	6/20/2025	20;21:00	8:55:00 PM	11:15:00 PM	34	CV Decoru s		Bp Feri Kurnia wan	Pingit	Pringsur at	cilo	Serbuk			Nihil	nih il		Rp 30,000,000	Rp 100,000,000, 000
34	Selasa	6/24/2025	9:50:00 AM	10:08:00 AM	10:45:00 AM	18			Bp Choiru din	JlJembatan Bendoperi	Tembara k	pohon	pemba karan sampa h			Nihil	nih il			

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2025

Keterangan :

- 1. Tabel Warna **Merah** menerangkan respontime di atas 15 menit
- 2. Warna Putih menerangkan respontime di bawah 15 menit
- 3. Tabel Warna **Hijau** menerangkan masuk dalam WMK (Wilayah Manajement Kebakaran RISPK)
- 4. Tabel Warna **Biru** menerangkan penanganan Kebakaran di Luar Wilayah Kabupaten Temanggung

b. Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota,Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Rumus indikatornya sebagai berikut:

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah.

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X

X 100%

Tabel 2.18

Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tahun 2020 s.d Tahun 2025 TW II

NO	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II
1.	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah.	30	21	28	51	45	12
2.	Jumlah kejadian di kabupaten/ kota pada tahun X	54	44	64	131	107	34
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	55,5%	47,72	43,75%	38,93%	42,05%	35,29%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025 TW II

Perhitungan untuk layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan SPM yang baru ditetapkan di tahun 2018. Total untuk layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan Pemadam Kebakaran yaitu 107 kejadian Kebakaran.

Dari data tabel 2.18 untuk capaian layanan SPM Sub urusan kebakaran kabupaten/ kota yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran pada Tahun 2025 tercapai 35,29% meningkat dari Tahun 2024, dikarenakan pada tahun 2025 kasus kebakaran banyak terjadi di Wilayah WMK. Untuk tahun 2025 jumlah kebakaran mencapai 34 kasus dan yang respontime kurang dari 15 menit sejumlah 12 kasus, sehingga capaian layanan kebakaran mencapai 35,29%.

Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2025 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.19
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHambat	UPAYA PENYELESAIAN
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 2) Sarana Media sosial sangat membantu memberikan informasi tentang upaya pencegahan dan penaggulangan bahaya kebakaran dan mempercepat menyampaikan informasi kejadian kebakaran sampai ke pos Damkar untuk segera ditindaklanjuti	1) wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll; 2) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran; 3) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroti serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi. 4) Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran	1) Peningkatn sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2) Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di Pos Damkar 3) Menambah Pos Pemadam Kebakaran di setiap WMK

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025

c. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksakan oleh kelompok relawan (Balakar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran

Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok relawan Pemadam Kebakaran (Balakar, Redkar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 364.1-306 tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, di Kabupaten Temanggung penghitungan indikatornya sebagaimana tercantum di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2008 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Rumus cara perhitungan indikator adalah:

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap oleh kelompok relawan (Balakar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran/ Perangkat Daerah

$\times 100 \%$

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun x

Tabel 2.20

Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran Temanggung s.d Tahun 2025 TW II

NO	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	n.a	n.a	n.a	n.a	0	0
2.	Jumlah kejadian di kabupaten/ kota pada tahun X	54	44	64	131	107	34
3.	Capaian layanan SPM Sub Urusan kebakaran	n.a	n.a	n.a	n.a	0	n.a

	di kabupaten/ kota yang dilaksanakan Oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran						
--	---	--	--	--	--	--	--

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025 TW II

Dari data tabel 2.20 untuk capaian layanan SPM Sub urusan kebakaran kabupaten/ kota yang dilaksanakan oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2025 Triwulan II tidak tercapai sama sekali atau 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran yang mendukung Pembentukan Kelompok Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Temanggung dan Tidak adanya anggaran Sarana Prasarana yang akan digunakan Kelompok Relawan (REDKAR) dalam menangani Kebakaran.

d. Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 28 ayat 2 huruf b dan Pasal 30 ayat 1,2,3,4 Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung maka Dinas teknis melakukan inspeksi/pengawasan proteksi kebakaran dalam bangunan Gedung,

Jumlah bangunan/gedung/lingkungan yang telah diinspeksi

Jumlah bangunan gedung/lingkungan yang belum diinspeksi

X 100 %

Tabel 20.21

Presentase Bangunan Gedung yang menjadi prioritas inspeksi
adapun rumus indikatornya yaitu :

No	Uraian	TAHUN
----	--------	-------

		2023	2024	2025 Tw II
1.	Jumlah bangunan/gedung/lingkungan yang telah diinspeksi	n.a	30	17
2.	Jumlah bangunan gedung/lingkungan yang belum diinspeksi	n.a	1170	1170
3.	Persentase Bangunan/Gedung/Lingkunagn yang menjadi Prioritas Inspeksi	n.a	2,56 %	1,45%

Sumber Data Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Tabel 2.22

Tabel data dukung Bangunan Gedung yang sudah di Inspeksi
Tahun 2025 TW II

NO	NAMA INSTANSI	PELAKSANAAN INSPEKSI		TAHAP INSPEKSI		
				I	II	III
GEDUNG PEMERINTAH						
GEDUNG SWASTA						
1	BPR BANK SURYA YUDHA KC TEMANGGUNG	Februari	2025	√		
2	KOSPIN JASA	Februari	2025	√		
3	BCA KCP TEMANGGUNG	Maret	2025	√		
4	KSP KOPDIT PELITA USAHA	Maret	2025	√		
5	SPPG (TAALEA CATERING) KAUMAN TMG	April	2025	√		
6	SPPG (BINTANG CATERING) GIYANTI TMG	April	2025	√		
7	SPPG (KAYU MANIS) PARAKAN	April	2025	√		
8	KSPPS ANUGERAH PARAKAN	April	2025	√		
9	PT. BANK MANDIRI PARAKAN	April	2025	√		
10	SPPG Prawara sita Dangkel	April	2025	√		
11	SPPG Tegalurung Bulu	April	2025	√		
12	SPPG Watu karung (Campursari)	April	2025	√		
13	SPPG King (Perum serimpi Baru, Madureso)	April	2025	√		
14	SPPG Pingit, Pringsurat	Mei	2025	√		
15	BTPN KCP Temanggung	Juni	2025	√		

16	PT BPR Intan Surya	Juni	2025	√		
17	Pengadilan Negeri Temanggung	Juni	2025		√	

Tabel 2.23

Data Kegiatan Inspeksi Bangunan Gedung tahun 2025 TW II

NO	HARI	TANGGAL	ALAMAT	KETERANGAN
1	SENIN	2/17/2025	KOSPIN JASA TEMANGGUNG, Jln. Tentara pelajar ruko Blok C Temanggung	INSPEKSI
2	SENIN	2/17/2025	SURYA YUDHA KC. TEMANGGUNG	INSPEKSI
3	KAMIS	3/6/2025	BCA KCP TEMANGGUNG	INSPEKSI
4	KAMIS	3/13/2025	KSP KOPDIT PELITA USAHA. KOWANGAN TEMANGGUNG	INSPEKSI
5	KAMIS	3/20/2025	KJKS INDO ARTHA SYARIYAH, Cekelan , Madureso, Temanggung	INSPEKSI

Sumber Data Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025

d. Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota. bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran, maka cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota dijabarkan sebagai berikut:

- a. WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- b. WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- c. WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (response time) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran dengan tujuan antara lain Pengurangan resiko kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban.

Dengan penambahan pos layanan pemadam dapat memangkas waktu tanggap darurat (*response time rate*). Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang tidak membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*). Pemerintah kabupaten/ kota dalam membentuk suatu kawasan WMK harus menyediakan:

- a. Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran beserta garasi untuk mobil pemadam dan letak Pos Pemadam berada di tengah suatu kawasan WMK;
- b. Mobil Pemadam meliputi 1 unit truk pemadam kebakaran, 1 unit truk tanki air/ *water supply* dan 1 unit mobil *rescue*;
- c. Menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, minimal 6 personil dalam 1 unit kendaraan termasuk Alat Perlindungan Diri (APD) bagi personil Damkar;
- d. Sarana dan prasarana pada tanggap darurat serta sarana pendukung penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran maupun non kebakaran.

Rumus cara perhitungan indikator adalah:

$$\frac{\text{Jumlah luas WMK kabupaten/kota}}{\text{Jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/ kota}} \times 100 \%$$

Dalam Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Temanggung terdapat 6 (enam) pos pelayanan WMK yaitu Pos Mako Temanggung, Pos Pemadam Candioto, Pos Pemadam Pringsurat, Pos Pemadam Ngadirejo, Pos Pemadam Parakan, Pos Pemadam Tembarak.

Sampai saat ini baru berdiri 3 (tiga) pos pelayanan Pemadam Kebakaran yaitu:

- a. Pos Mako Temanggung yang berada di lingkungan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, beralamat di Jl. Lingkar Utara Maron Temanggung; Wilayah Pelayanan Kebakarannya yaitu : Kecamatan Temanggung, Kecamatan Tembarak,Kecamatan Selopampang,Kecamatan Tlogomulyo.
- b. Pos Pemadam Wilayah Candiroto yang terletak dibelakang Kantor Kecamatan Candiroto, beralamat di Jl. Candiroto no. 32; Wilayah Pelayanan Kebakarannya yaitu : Kec Candiroto, Kec Bejen,Kec Tretep,Kec Wonobojo.
- c. Pos Pemadam Wilayah Pringsurat yang terletak dibelakang Kantor Kecamatan Pringsurat, beralamat di Jl. Raya Pringsurat no. 1. Wilayah Pelayanan Kebakarannya yaitu : Kec Pringsurat, Kec Kaloran, Kec Kranggan.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2020 s.d Tahun 2025 TW II dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten Temanggung, Tahun 2020
s.d Tahun 2025 TW II

Uraian	satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II
Jumlah WMK Kabupaten/Kota	km2	528	528	528	528	528	528
Jumlah wilayah Kabupaten	km2	870,65	870,65	870,65	870,65	870,65	870,65
Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%

Sumber data : Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung, Tahun 2025 Tw II

Dari data di atas, cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten tidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2025 TW II tidak dapat terlaksana pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga tidak terdapat penambahan pos, sehingga apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatas sejumlah 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja

pembangunan daerah Triwulan II tahun 2025 adalah sesuai tabel berikut:

Tabel 2.25
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Cakupan Penanganan bencana kebakaran Kabupaten	Kondisi suhu udara yang dingin di Temanggung karena topologi pegunungan dan perbukitan	1. Temanggung memiliki wilayah yang luas. 2. Topologi Temanggung yang pegunungan, perbukitan dan lembah. 3. Model permukiman yang berkerumun mengakibatkan akses jalan lingkungan yang kecil. 4. pengetahuan warga mengenai bahaya kebakarna masih rendah	1. Peningkatan sarapras 2. Peningkatan kompetensi pegawai 3. Pemberdayaan masyarakat

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut:

- 1. Tingkat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dari 8 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten

Hal ini disebabkan karena cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten tidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2023 belum terdapat tambahan pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga tidak terdapat penambahan pos, sehingga apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan

penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatas sejumlah 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

- Indikator Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate).
Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kendala diantaranya :
 - a) Kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dlm kondisi kecepatan tinggi, berisi air dn jalan yg berliku, naik turun atau gelombang
 - b) Kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, y koneksi, nozel, dll) yang sudah tua dan lapuk
 - c) wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran
- Indikator Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Hal ini disebabkan karena Response time memiliki beberapa faktor kendala sebagai berikut:
 - a) Terbatasnya sumber air dan belum tersedianya suber air (Goundtank);
 - b) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran ;
 - c) kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas;
 - d) Perubahan kondisi lalu lintas;
 - e) Perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran yang sebagian sudah berumur;
 - f) Hambatan *akseleri* unit pemadam kebakaran antara lain wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
 - g) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, antara lain
 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam hal SDM Satuan Polisi Pamong Praja maupun Pemadam Kebakaran.
 2. Masih minimnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi
 3. Kurangnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
 4. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kesadaran penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kesadaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 6. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
 7. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum;
 8. Perlunya peningkatan kemampuan SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dalam menghadapi permasalahan kedepan yang semakin kompleks;
 9. Sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih belum memenuhi standar kebutuhan;

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar dilakukan upaya penunjang pelaksanaan kegiatan melalui :

1. Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat *low manager* sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas
2. Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda

3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.
4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.
5. Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan pembinaan secara rutin dan mengintensifkan patroli
6. Mengikutsertakan personil untuk mengikuti Diklat, bimbingan teknis, ataupun mengikuti lomba yang bersifat pengembangan kapasitas aparatur
7. Ketersediaan anggaran yang memadai sebagai penunjang keberhasilan pencapaian target tujuan

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Terdapat pengurangan sub kegiatan di luar rancangan awal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, yaitu sejumlah 1 (satu) sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.

Sesuai hasil analisa kebutuhan terdapat penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- b. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum

- c. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia
- d. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota (DBHCHT)
- e. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- f. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- g. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
- h. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.34

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter anga n
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					7.560.537.646	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					9.919.594.478	
A.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6.642.222.896	A.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					7.496.410.335	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.884.727.596	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.884.727.596	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	5.884.727.596	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	5.884.727.596	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah					99.821.300	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah					99.821.300	
a	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	99.821.300	a	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab Temanggung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	99.821.300	
3	Administrasi umum perangkat daerah					90.500.000	3	Administrasi umum perangkat daerah					90.500.000	
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	8.000.000	a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	8.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.000.000
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	0
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	15.000.000
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	7.500.000
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	20.000.000
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	laporan	20.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0

HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.000.000	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	0	
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	15.000.000	
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	7.500.000	
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	20.000.000	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	laporan	20.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
b	Pengadaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	0
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	0
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					247.174.000
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	70.000.000
b	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	laporan	5.000.000

HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter anga n
1	2	3	4	5	6	7	
b	Pengadaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	0	
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	0	
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					1.281.361.439	
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	70.000.000	
b	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	laporan	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	172.174.000
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					140.000.000
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	unit	40.000.000
b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Temanggung	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	16	unit	80.000.000
c	Pemeliharaan mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	unit	0
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	20.000.000

HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter anga n
1	2	3	4	5	6	7	
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	1.206.361.439	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					140.000.000	
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	unit	40.000.000	
b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Temanggung	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	16	unit	80.000.000	
c	Pemeliharaan mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	unit	0	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
B	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum					225.000.000
1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota					205.000.000
a	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12	Laporan	100.000.000
b	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	bulan	35.000.000

HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter anga n
1	2	3	4	5	6	7	
B	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum					1.560.006.393	
1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota					913.738.000	
a	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12	Laporan	100.000.000	
b	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	bulan	35.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
d	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab Temanggung	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	12	dokumen	20.000.000
e	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Kab. Temanggung K	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1050	orang	50.000.000
g	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Temanggung	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	bulan	0
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					0
a	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Temanggung				0

HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
d	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab Temanggung	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	12	dokumen	624.828.000	PILKADES
e	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Kab Temanggung	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1050	orang	153.910.000	Pembentukan satgas Linmas
g	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kab Temanggung	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	bulan	0	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					0	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Temanggung				0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota					20.000.000
a	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	Laporan	20.000.000
b	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota (DBHCHT)	Kab. temanggung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	laporan	0
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					873.314.750
1	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota					681.077.750
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket	12	Laporan	107.321.750

HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter anga n
1	2	3	4	5	6	7	
2	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota					646.268.393	
a	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	Laporan	20.000.000	
b	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	laporan	626.268.393	
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					863.177.750	
1	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota					620.940.750	
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan	12	Laporan	334.184.750	

RANCANGAN AWAL RKPd 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter anga n
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					ta		Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
b	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12	Dokum en	25.756.000	b	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulan n kebakaran dan alat pelindung diri	Kab Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12	Dokum en	235.256.000	
c	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	1	Paket	548.000.000	c	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulan n kebakaran dan alat pelindung diri	Kab Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	1	Paket	0	
d	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Temanggung	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam		orang	0	d	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Temanggung	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan		orang	51.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					50.000.000
a	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12	dokumen	50.000.000
3	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran					142.237.000
a	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kab. Temanggung	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	12	orang	142.237.000
b	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah	1	Paket	0

HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Penanggulangan Kebakaran				
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					100.000.000	
a	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12	bulan	100.000.000	Prioritas bupati 50.000.000
3	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran					142.237.000	
a	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kab. Temanggung	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	12	orang	142.237.000	
b	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia	12	bulan	0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter anga n
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Tersedia Dukungan Sapras Damkar							Dukungan Sapras Damkar				

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung. Namun dalam proses ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tidak berperan dalam proses pengakomodasian usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tidak menjadi pengampu hasil dari musrenbang RKPD Tahun 2026.

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun tidak ada inovasi yang telah dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 4 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung ada 4 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.37
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2024

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Piagam penghargaan Akuntabilitas Kinerja tahun 2024	Bupati Temanggung	Kabupaten	Inspektorat
2	Juara harapan 2 National Fire Fighter Skill Competition Ladder Pitching	Menteri Dalam Negeri	Nasional	Satpol PP dan damkar
3	Official Favorit National Firefighter Skill Competition	Menteri Dalam Negeri	Nasional	Satpol PP dan Damkar
4	Juara 1 Lomba Pawai Praja	Satpol PP Provinsi Jateng	Provinsi	Satpol PP dan Damkar

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung yang melaksanakan urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan urusan tersebut, maka Satpol PP dan Pemadam Kebakaran perlu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memasukkan indikator baru yang belum termuat dalam RPJMD 2025-2029 berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan jenis pelayanan dasar terdiri atas :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ;

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

- pelayanan kerugian materil; dan
- pelayanan pengobatan.

Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada.

Kerugian materiil sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
- rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima

persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada. Warga negara dengan kriteria:

- o yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
- o berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam:

- o Program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah; dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD;
- o Dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja; dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
- o Satpol PP dalam menyusun dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
- o Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;

- Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
- Penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP;
- Dan Satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah warga negara yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya.

Dalam hal terdapat warga negara:

- ➔ Terkena dampak kerugian materil akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;
- ➔ Terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama; dan terkena dampak kerugian cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.
- ➔ Perbaikan atas kerugian materil dan cedera fisik ringan pendanaannya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada.

b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

Dalam RPJMD 2025-2029 maka untuk kedua jenis layanan dasar tersebut masih diuraikan dalam indikator berdasarkan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup

- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda adalah jumlah warga yang mengalami kerugian akibat dari penegakan Perda dan Perkada baik kerugian materiil maupun luka-luka, sedangkan jumlah kejadian adalah jumlah kegiatan Satpol PP dalam melaksanakan penertiban ataupun penegakan Perda dan Perkada.

2. Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran

- Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

- Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok relawan (Balakar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran

Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok relawan Pemadam Kebakaran (Balakar, Redkar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 364.1-306 tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, di Kabupaten Temanggung penghitungan indikatornya sebagaimana tercantum di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2008 tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2026, maka tujuan dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2026 adalah:

a. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum”** dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu **Presentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**. Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Temanggung yaitu **Temanggung Untuk Semua (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, Aman)**.

b. Sasaran

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini adalah dalam rangka:

- 1. Meningkatnya Perda dan Perbup yang ditegakan**
- 2. Meningkatnya pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/Kota**
- 3. Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDISI AKHIR 2027
Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum			
	Meningkatnya perda dan perbup yang ditegakkan		Persentase penegakan Perda/Perbup			
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Satlinmas yang Terlatih	%	30,79	48,09
			Presentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100
			Presentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perbup	%	100	100
			Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100
	Meningkatnya Pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran kabupaten/kota		Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran			
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100
			Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	100
			Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	%	100	100
			Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	%	61,05	81,4
			Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi	%	6,15	9,23
			Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang	%	100	100

			membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran)			
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2025-2029

Kebijakan dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.560.537.646	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.919.594.478	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.462.222.896	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.496.410.335	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.884.727.596	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.884.727.596	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.884.727.596		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.884.727.596	
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.821.300	b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,821,300	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99.821.300		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99,821,300	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.500.000	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.174.000	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.281.361.439	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.174.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,206,361,439	

f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	40.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	80.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	20.000.000
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	225.000.000
a	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	205.000.000
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	50.000.000
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100.000.000
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	35.000.000
b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	20.000.000
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	873.314.750
a	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	681.007.750

f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	40.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	80.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	20.000.000	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.560.006.393	
a	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	913.738.000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	624.828.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	153.910.000	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100.000.000	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	35.000.000	
b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	646.268.393	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	626,268,393	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000	(50.000.000)
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	863.177.750	
a	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	620.940.750	

RENJA 2026 SATPOL PP DAN DAMKAR

	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.821.750		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	334,184,750	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	93.756.000		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	235,256,000	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	51,500,000		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	51,500,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	450.000.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	50.000.000		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100.000.000	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	50.000.000		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100.000.000	
c	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	142,237,000	c	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	142,237,000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	142,237,000		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	142,237,000	
	JUMLAH	7.560.537.646		JUMLAH	9.919.594.478	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp. 50.000.000,- Jika dilihat lebih jauh untuk penurunan Belanja Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dikarenakan terdapat pengurangan anggaran untuk kegiatan DBHCHT.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung
Tahun 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
<u>1</u>					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
<u>1</u>	<u>0</u>				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					7.421.410.335				6.575.358.718
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.0</u>		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.884.727.596				5.884.727.596
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.0</u>	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.884.727.596	DAU	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5.884.727.596
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.0</u>		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					99.821.300				117.100.122
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.0</u>	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	99.821.300	DAU	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	117.100.122
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.0</u>		Administrasi Umum Perangkat Daerah					90.500.000				110.000.000
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.0</u>	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.000.000	DAU	Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.0</u>	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	DAU	Tercukupinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	20.000.000
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.0</u>	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Satpol PP dan Damkar		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	0	DAU	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	5.000.000

RENJA 2026 SATPOL PP DAN DAMKAR

						Temanggun g									
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>1</u>	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggun g		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya ATK, alat dan bahan kebersihan	15.000.000	DAU		Tersedianya ATK, alat dan bahan kebersihan	1 Paket	20.000.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>1</u>	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggun g		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	DAU		Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	10.000.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>1</u>	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggun g		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum harian pegawai, jamuan makan minum tamu	20.000.000	DAU		Tersedianya makan minum harian pegawai, jamuan makan minum tamu	12 Bulan	20.000.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>1</u>	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggun g		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	20.000.000	DAU		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	25.000.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>1</u>	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0					15.000.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>1</u>	2.0 7	000 5	Pengadaan Mebel	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggun g		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tercukupinya Mebel yang dibutuhkan	0	DAU		Tercukupinya Mebel yang dibutuhkan	1 Paket	15.000.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>1</u>	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggun g		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tercukupinya Peralatan dan Mesin yang dibutuhkan	0	DAU		Tercukupinya Peralatan dan Mesin yang dibutuhkan	2 Unit	0
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>1</u>	2.0 7	000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggun g		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	DAU		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>1</u>	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.206.361.4 39					263.674.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>1</u>	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggun g		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	70.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	84.000.000
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	2.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Kantor		Jumlah Laporan	Tercukupinya Jasa Peralatan	5.000.000	DAU		Tercukupinya Jasa	12 Bulan	7.500.000

RENJA 2026 SATPOL PP DAN DAMKAR

	<u>5</u>	<u>1</u>	8	3	Kantor	Satpol PP dan Damkar Temanggung		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	dan Perlengkapan Kantor				Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>1</u>	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Jasa honor penjaga keamanan dan petugas kebersihan kantor	1,206,361,439	DAU		Tercukupinya Jasa honor penjaga keamanan dan petugas kebersihan kantor	12 Bulan	172.174.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>1</u>	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					140.000.000					184.857.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>1</u>	2.0 9	000 1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tercukupinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	DAU		Tercukupinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	59.857.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>1</u>	2.0 9	000 2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Tercukupinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	DAU			12 Bulan	100.000.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>1</u>	2.0 9	000 5	Pemeliharaan Mebel	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Tercukupinya pemeliharaan mebel kantor	0	DAU		Tercukupinya pemeliharaan mebel kantor	1 Paket	5.000.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>1</u>	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	DAU		Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	20.000.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>2</u>			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.560.046.393					215.157.500
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>2</u>	2.0 1		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					913.778.000					195.157.500
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	624.828.000	DAU				20.000.000
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi	Kantor		Jumlah SDM	Terlaksananya	153.950.000	DAU				50.000.000

RENJA 2026 SATPOL PP DAN DAMKAR

					Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP dan Damkar Temanggung		Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia						
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>2</u>	2.0 1	001 5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase pengaduan yang berkaitan dengan trantibum yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawasan	100.000.000	DAU		Terlaksananya kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 Bulan	90.000.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>2</u>	2.0 1	001 6	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melaluiPenertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase penegakan Perda/Perbup	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	35.000.000	DAU		Terlaksananya penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	12 Bulan	35.157.500
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>2</u>	2.0 1		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota					646.268.393					20.000.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>2</u>	2.0 2	001 1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase penegakan Perda/Perbup	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	626.268.393	DBHCHT		Tertanganinya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota	12 Bulan	0
					Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	Kantor Satpol PP		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	Terlaksananya Pengawasan yang	20.000.000	DAU			12 bulan	20.000.000

RENJA 2026 SATPOL PP DAN DAMKAR

					Kepala Daerah	dan Damkar Temanggun g		Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>4</u>			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					863.177.750					423.926.070
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>4</u>	2.0 1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					620.940.750					231.689.070
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>4</u>	2.0 1	000 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggun g	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	334,184,750	DAU		Tercapainya respon time damkar dari pos terdekat ke lokasi kebakaran sampai dengan air keluar maksimal 15 menit, Meminimalisir dampak kejadian kebakaran berupa korban jiwa dan harta benda	12 Bulan	86.433.070
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>4</u>	2.0 1	000 5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggun g	Presentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	235,256,000	DAU		Terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan kejadian kebakaran	12 Bulan	93.756.000
					Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggun g		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	51,500,000	DAU			12 bulan	51.500.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>4</u>	2.0 2		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					100.000.000					50.000.000

RENJA 2026 SATPOL PP DAN DAMKAR

<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>4</u>	2.0 2	000 1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100,000,000	DAU		Terdatanya kualitas dan kuantitas sarpras proteksi kebakaran di instansi pemerintah, instansi swasta atau pemukiman masyarakat	12 Bulan	50.000.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>4</u>	2.0 4		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					142.237.000					142.237.000
<u>1</u>	<u>0</u> <u>5</u>	<u>0</u> <u>4</u>	2.0 4	000 1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	142,237,000	DAU		Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejadian kebakaran dan pelaksanaan kegiatan hasil musrenbang	1 Paket	142.237.000

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 97,19 %, realisasi Belanja Modal sebesar 38,06 %, belanja Daerah Sebesar 11.635.886.391,-, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester II terdiri dari Belanja Operasional

sebesar 38,44 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0 %, belanja Daerah sebesar 4.531.635.213,-.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 (Perangkat Daerah) mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 9,919,594,478,- yang terdiri dari 3 program antara lain program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025



AGUS SARWONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660411 198607 1 001